



PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM STUDI KELAYAKAN UMKM DI PALEMBANG

APPLICATION OF ISLAMIC ECONOMIC PRINCIPLES IN THE FEASIBILITY STUDY OF MSMES IN PALEMBANG

Ade Ramadani¹, Vicha Aprilia², Aldi Arya Andika Saputra³

UIN Raden Fatah Palembang

Email: aprilliavicha01@gmail.com¹, aderamadanixx@gmail.com², aldiaryaandika@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 11-05-2025

Revised : 13-05-2025

Accepted : 15-05-2025

Pulished : 17-05-2025

Abstract

This study aims to examine the application of Islamic economic principles in the feasibility analysis of Micro, Small, and Medium Enterprises (SMEs) in Palembang. Principles such as justice, prohibition of usury (riba), honesty, cooperation, balance, fair risk management, and social responsibility serve as the foundation for assessing SME business feasibility sustainably. The research employs a qualitative case study approach, utilizing interviews and document analysis for data collection. The results indicate that applying Islamic economic principles encourages SMEs to achieve not only financial profitability but also social benefits for the community. However, challenges remain, including limited access to sharia-based financing, lack of understanding among business actors, and inadequate infrastructure support. Islamic financial institutions play a crucial role in supporting SMEs through financing, education, and business mentoring. This study recommends that government and related stakeholders enhance support for SMEs based on Islamic economics to create a fair and sustainable business ecosystem.

Keywords: *Islamic Economics, UMKM, Feasibility Study*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam studi kelayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Palembang. Prinsip-prinsip seperti keadilan, larangan riba, kejujuran, kebersamaan, keseimbangan, pengelolaan risiko yang adil, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar dalam menilai kelayakan usaha UMKM secara berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus, melibatkan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam mampu mendorong UMKM agar tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan akses pembiayaan syariah, kurangnya pemahaman pelaku usaha, dan dukungan infrastruktur yang masih terbatas. Peran lembaga keuangan syariah sangat penting dalam mendukung UMKM melalui pembiayaan, edukasi, dan pendampingan usaha. Studi ini memberikan rekomendasi agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan dukungan terhadap UMKM berbasis ekonomi Islam guna menciptakan ekosistem usaha yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, UMKM, Studi Kelayakan*

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional, termasuk di wilayah Palembang. UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta



meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, banyak pelaku UMKM yang belum mampu menerapkan prinsip-prinsip usaha yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Ekonomi Islam hadir sebagai sistem yang tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebersamaan, kejujuran, serta keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman penting dalam menganalisis kelayakan usaha agar tidak hanya layak dari segi finansial, tetapi juga bermanfaat secara sosial dan spiritual (Abdullah, 2011).

Di tengah upaya memperkuat ekonomi syariah nasional, penting untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan oleh UMKM di Palembang, serta kendala apa saja yang mereka hadapi. Selain itu, peran lembaga keuangan syariah juga perlu dikaji, mengingat potensinya dalam menyediakan solusi pembiayaan yang sesuai syariah dan mendukung pertumbuhan UMKM secara adil dan beretika. Penelitian ini akan membahas penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam studi kelayakan UMKM di Palembang, tantangan yang dihadapi, serta dukungan dari lembaga keuangan syariah dalam menciptakan usaha yang produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam studi kelayakan UMKM di Palembang. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, pengelola lembaga keuangan syariah, serta pihak terkait lainnya yang berperan dalam pengembangan UMKM. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data dokumentasi dan observasi langsung untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan data berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan dalam praktik UMKM. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan mengelompokkan temuan-temuan berdasarkan aspek-aspek prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, larangan riba, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Menganalisis Kelayakan Usaha di Palembang

1. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menganalisis kelayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Palembang dapat dilihat dari beberapa aspek yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Berikut adalah beberapa cara prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam menganalisis kelayakan UMKM (Abdullah, 2011)
2. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*): Dalam ekonomi Islam, penting untuk memastikan bahwa setiap individu atau pihak yang terlibat dalam usaha mendapatkan haknya secara adil. Dalam konteks UMKM di Palembang, hal ini dapat diterapkan dengan memastikan bahwa pemilik usaha, pekerja, dan konsumen diperlakukan dengan adil. Misalnya, penentuan upah yang wajar bagi pekerja dan harga yang adil bagi konsumen serta pembagian keuntungan yang seimbang antara pemilik usaha dan pihak lainnya.



3. Prinsip Larangan Riba (*Al-Riba*): Dalam menganalisis kelayakan usaha, penting untuk memastikan bahwa pembiayaan yang digunakan oleh UMKM tidak melibatkan praktik riba. Banyak UMKM di Palembang yang mungkin membutuhkan modal untuk berkembang, dan prinsip ekonomi Islam akan mendorong penggunaan pembiayaan berbasis bagi hasil (seperti mudharabah atau musyarakah) atau pembiayaan tanpa bunga yang lebih adil bagi semua pihak.
4. Prinsip Kejujuran dan Transparansi (*Al-Sidq*): Dalam menjalankan usaha, prinsip kejujuran menjadi hal yang penting. Analisis kelayakan usaha UMKM harus memperhatikan aspek kejujuran dalam pelaporan keuangan dan transaksi bisnis. Pemilik usaha harus memastikan bahwa laporan keuangan mereka akurat dan transparan, serta tidak ada penipuan atau manipulasi data yang dapat merugikan pihak lain
5. Prinsip Kebersamaan (*Ta'awun*): Ekonomi Islam mendorong kerja sama yang saling menguntungkan antara berbagai pihak. Dalam konteks UMKM di Palembang, ini bisa berarti kolaborasi antara pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung. Misalnya, usaha mikro dan kecil bisa bekerja sama dalam bentuk koperasi atau jaringan pemasaran bersama untuk mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing.
6. Prinsip Keseimbangan (*Al-Mizan*): Dalam ekonomi Islam, terdapat prinsip keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, kelayakan usaha UMKM di Palembang perlu dianalisis tidak hanya dari segi keuntungan finansial tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat. Usaha yang layak adalah usaha yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan sosial, tidak hanya keuntungan individu atau Perusahaan (Abdullah, 2011).
7. Prinsip Pengelolaan Risiko yang Adil (*Al-Ghunm bi al-Ghurm*): Dalam ekonomi Islam, ada konsep bahwa keuntungan harus sebanding dengan risiko yang diambil. Dalam analisis kelayakan UMKM, penting untuk mengevaluasi risiko usaha dan memastikan bahwa pengelolaan risiko dilakukan secara adil. Hal ini bisa diterapkan dengan memanfaatkan instrumen asuransi syariah atau sistem pembiayaan yang adil.
8. Prinsip Tanggung Jawab Sosial (*Mas'uliyah*): Prinsip ini menekankan pentingnya setiap pelaku ekonomi untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usaha. UMKM di Palembang perlu dianalisis kelayakannya tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pelestarian lingkungan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menganalisis kelayakan UMKM di Palembang memastikan bahwa usaha yang dijalankan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara adil dan berkelanjutan (Abdullah, 2011).

Tantangan Umkm di Palembang Dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Praktik Bisnis

UMKM di Palembang menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik bisnis mereka. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain (Hasan, 2013):



1. Keterbatasan Akses Pembiayaan Syariah: Meskipun ada lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk pembiayaan, akses UMKM terhadap pembiayaan berbasis syariah masih terbatas. Banyak UMKM yang lebih terbiasa dengan sistem pembiayaan konvensional yang berbasis bunga, sehingga kesulitan dalam memahami atau mengakses pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Selain itu, lembaga keuangan syariah mungkin tidak selalu memiliki produk yang sesuai dengan kebutuhan spesifik UMKM di Palembang.
2. Kurangnya Pemahaman dan Sosialisasi tentang Ekonomi Islam: Banyak pelaku UMKM di Palembang yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kurangnya sosialisasi mengenai konsep-konsep seperti larangan riba, keadilan dalam bisnis, atau pembiayaan berbasis bagi hasil dapat membuat mereka kurang siap dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif tentang ekonomi Islam sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman ini.
3. Kesulitan dalam Menjaga Transparansi dan Kejujuran: Prinsip kejujuran dan transparansi dalam laporan keuangan serta dalam transaksi bisnis sering kali menjadi tantangan, terutama bagi UMKM yang belum memiliki sistem akuntansi yang kuat. Banyak UMKM yang masih mengandalkan pencatatan manual atau tidak memiliki laporan keuangan yang terstruktur, yang membuat mereka kesulitan dalam menerapkan prinsip kejujuran dan transparansi sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
4. Persaingan dan Praktik Bisnis yang Tidak Sesuai Syariah: Di pasar yang sangat kompetitif, banyak UMKM yang merasa terpaksa untuk mengikuti praktik bisnis yang kurang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, seperti melakukan penipuan harga, menerapkan taktik pemasaran yang tidak transparan, atau memanfaatkan praktik riba dalam pembiayaan. Kompetisi yang ketat sering kali mendorong pelaku usaha untuk mengambil jalan pintas yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.
5. Kurangnya Infrastruktur dan Dukungan Pemerintah: Meskipun pemerintah daerah Palembang dan lembaga keuangan telah memberikan beberapa dukungan untuk UMKM, namun masih terbatasnya infrastruktur dan sistem pendukung untuk bisnis yang berprinsipkan ekonomi Islam menjadi kendala. Kurangnya platform digital atau akses ke sumber daya yang memadai untuk UMKM yang ingin beroperasi dengan prinsip syariah sering kali membuat mereka kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara efektif (Hasan, 2013).
6. Ketergantungan pada Modal yang Tidak Sesuai Syariah: Banyak UMKM di Palembang yang masih mengandalkan modal dari pinjaman berbunga atau investasi pribadi yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Ketergantungan pada modal tersebut membuat mereka kesulitan untuk beralih ke model pembiayaan berbasis syariah yang lebih adil dan transparan.
7. Kesulitan dalam Menjaga Keseimbangan Sosial dan Keuntungan: Prinsip keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi (keuntungan dan tanggung jawab sosial) bisa menjadi tantangan, terutama bagi UMKM yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Menjaga keseimbangan antara mendapatkan keuntungan dan memberi manfaat bagi masyarakat, seperti dengan memberikan lapangan pekerjaan atau memperhatikan dampak lingkungan, dapat sulit dicapai, apalagi dalam kondisi pasar yang penuh tekanan.



8. Regulasi yang Tidak Mendukung: Terkadang, regulasi atau kebijakan pemerintah yang ada belum sepenuhnya mendukung UMKM untuk menerapkan prinsip ekonomi Islam, terutama terkait dengan pembiayaan syariah atau model usaha yang berbasis bagi hasil. Tidak adanya insentif atau kebijakan yang jelas untuk mendorong UMKM menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah seringkali menjadi hambatan.
9. Persepsi Negatif terhadap Pembiayaan Syariah: Sebagian masyarakat masih memandang pembiayaan syariah dengan skeptis atau tidak memahami sepenuhnya bagaimana produk pembiayaan syariah dapat menguntungkan mereka. Pandangan ini juga berpengaruh pada UMKM, yang merasa ragu untuk beralih ke pembiayaan syariah, karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana sistem ini bekerja.

Secara keseluruhan, meskipun ada potensi besar untuk UMKM di Palembang untuk menerapkan prinsip ekonomi Islam, tantangan-tantangan ini mengharuskan adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk memberikan dukungan yang tepat, baik dalam bentuk pendidikan, pembiayaan, maupun kebijakan yang mendukung ekonomi syariah (Hasan, 2013).

Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendukung Kelayakan Umkm Berdasarkan Prinsip-Prinsip Skonomi Islam di Palembang

Lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelayakan UMKM di Palembang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam kerangka ekonomi Islam, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan sosial yang lebih luas (Ramadhany Dkk, 2023). Berikut adalah beberapa peran yang dapat dimainkan oleh lembaga keuangan syariah untuk mendukung kelayakan UMKM di Palembang:

1. Penyediaan Pembiayaan yang Sesuai dengan Prinsip Syariah: Lembaga keuangan syariah dapat menyediakan produk pembiayaan yang bebas dari riba dan sesuai dengan prinsip syariah, seperti:
 - a. Mudharabah (Bagi Hasil): Di mana lembaga keuangan syariah dan UMKM berbagi keuntungan berdasarkan kesepakatan yang adil. Ini menghindari riba dan mendorong kerjasama yang saling menguntungkan.
 - b. Musyarakah (Kemitraan): Lembaga keuangan syariah dan UMKM berinvestasi bersama dalam suatu usaha dan berbagi risiko dan keuntungan. Ini memperkuat prinsip gotong royong dalam ekonomi Islam.
 - c. Murabahah (Jual Beli dengan Margin Keuntungan): Lembaga keuangan syariah dapat menawarkan pembiayaan dalam bentuk jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati bersama, tanpa bunga.

Dengan produk pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah mendukung UMKM untuk memperoleh modal tanpa harus bergantung pada bunga, yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang melarang riba.



2. Memberikan Pendampingan dan Pelatihan: Lembaga keuangan syariah tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kapasitas UMKM melalui pelatihan dan pendampingan. Program pelatihan ini bisa mencakup:
 - a. Pendidikan tentang Manajemen Keuangan: Membantu UMKM untuk membuat laporan keuangan yang akurat dan transparan, yang merupakan bagian dari prinsip kejujuran dalam ekonomi Islam.
 - b. Penyuluhan tentang Pembiayaan Syariah: Memberikan pemahaman tentang produk pembiayaan syariah dan cara pengelolaannya agar UMKM dapat memanfaatkannya dengan tepat.

Dengan pendampingan yang tepat, UMKM akan lebih siap untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

3. Mendukung Prinsip Keadilan dalam Pembiayaan: Lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam memastikan keadilan dalam pembiayaan. Dalam ekonomi Islam, pembiayaan yang diberikan harus adil dan transparan. Lembaga keuangan syariah dapat:
 - a. Menyusun struktur pembiayaan yang tidak memberatkan UMKM, dengan memperhatikan kemampuan bayar mereka, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti biaya tersembunyi atau bunga tinggi.
 - b. Menjaga transparansi dalam setiap transaksi, mulai dari penentuan margin keuntungan hingga jadwal pembayaran.

Dengan menjaga keadilan ini, lembaga keuangan syariah membantu UMKM mengembangkan usaha tanpa terbebani oleh ketidakpastian atau ketidakseimbangan dalam pembiayaan.

4. Mengoptimalkan Potensi Zakat, Infaq, dan Sedekah: Lembaga keuangan syariah dapat mendukung UMKM dengan mengoptimalkan potensi zakat, infaq, dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi. Lembaga ini dapat mengelola dana zakat dan infaq yang dikumpulkan dari masyarakat dan mendistribusikannya ke UMKM yang membutuhkan dukungan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Ini sangat relevan dengan prinsip ekonomi Islam yang mendorong keberlanjutan sosial dan ekonomi yang adil. Misalnya, lembaga keuangan syariah dapat membuat program yang menyediakan dana hibah atau pinjaman modal usaha tanpa bunga (qardhul hasan) untuk UMKM yang membutuhkan, khususnya yang bergerak di sektor-sektor yang menguntungkan masyarakat secara luas (Mujani, 2017).
5. Mengurangi Risiko Bisnis dengan Asuransi Syariah: Asuransi syariah (takaful) adalah cara untuk berbagi risiko secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Lembaga keuangan syariah dapat menyediakan produk asuransi syariah untuk melindungi UMKM dari risiko kerugian akibat bencana, kebakaran, atau peristiwa tak terduga lainnya. Dengan adanya produk asuransi syariah, UMKM di Palembang dapat mengelola risiko dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu berbagi risiko dengan cara yang adil.
6. Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan Sosial: Lembaga keuangan syariah juga dapat mendukung UMKM yang memiliki orientasi sosial, seperti usaha yang memberikan dampak positif bagi masyarakat atau lingkungan. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah dapat:



- a. Memberikan dukungan finansial dan teknis kepada UMKM yang fokus pada pemberdayaan masyarakat, pendidikan, atau keberlanjutan lingkungan.
- b. Membantu UMKM dalam membangun jaringan pasar dan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki tujuan sosial serupa.

Prinsip ekonomi Islam menekankan pentingnya tanggung jawab sosial, dan lembaga keuangan syariah dapat menjadi mitra strategis bagi UMKM yang ingin menjalankan usaha dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.

7. Memperkuat Ekosistem Ekonomi Syariah di Palembang: Lembaga keuangan syariah juga berperan dalam membangun dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Palembang. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas bisnis, lembaga keuangan syariah dapat:
 - a. Mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya ekonomi syariah dan manfaatnya bagi pengembangan UMKM
 - b. Membentuk sinergi antara pelaku UMKM, lembaga keuangan, dan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung prinsip-prinsip syariah.

Dengan memperkuat ekosistem ini, lembaga keuangan syariah dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi UMKM untuk berkembang dan menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam praktik bisnis mereka (Mujani, 2017).

Secara keseluruhan, lembaga keuangan syariah di Palembang dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung kelayakan UMKM. Melalui penyediaan pembiayaan berbasis syariah, pendampingan dalam manajemen keuangan, penerapan prinsip keadilan, serta pemanfaatan zakat dan infaq, lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa UMKM tidak hanya berkembang secara finansial tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, larangan riba, kejujuran, kebersamaan, keseimbangan, pengelolaan risiko yang adil, dan tanggung jawab sosial dalam menganalisis kelayakan UMKM di Palembang sangat relevan untuk menciptakan usaha yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat.

Meskipun potensinya besar, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses pembiayaan syariah, kurangnya pemahaman terhadap ekonomi Islam, dan infrastruktur pendukung yang belum memadai. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah memiliki peran penting sebagai fasilitator pembiayaan, pendampingan, edukasi, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi. Dukungan menyeluruh dari pemerintah, masyarakat, dan institusi keuangan syariah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ekosistem UMKM yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara berkelanjutan di Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Abdullah. (2011). *Ekonomi Islam: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada



- M. Syafi'i Hasan. (2013). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Bisnis dan Keuangan*. Yogyakarta: UII Press
- M. Ali Mujani. (2017). *Manajemen Keuangan Syariah untuk UMKM*. Bandung: Alfabeta
- Ramadhany, Nurmeiny Putri, Aravik, Havis, dan Choirunnisak, Choirunnisak. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*. Vol. 3 No. 1